

RENCANA KERJA 2023
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA,
TATA RUANG, PERTANAHAN DAN
PERUMAHAN RAKYAT



PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2022



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 44 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen rancangan awal perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan jangka menengah periode 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (4) Renja Perangkat Daerah menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III ISI DAN URAIAN

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN;
BAB II	: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V	: PENUTUP

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN DAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 5 Agustus 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 5 Agustus 2022

**plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 44

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan Rahmat-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan kewajiban Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat serta Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhitungkan berbagai faktor yang berpengaruh pada upaya pencapaian kinerja seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada dilingkungan eksternal dan internal organisasi.

Disadari bahwa penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga sangat diharapkan adanya koreksi, masukan dari berbagai pihak di dalam penyempurnaannya, namun diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sebagai panduan untuk menyusun program Tahunan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Pangkajene Sidenreng, Juli 2021

Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang,
dan Perumahan Rakyat



Drs. ABUL RASYID, M.Si

NIP. 1960081230 198611 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I PENDAHULUAN		1
I.1 Latar Belakang		1
I.2 Landasan Hukum		1
I.3 Maksud dan Tujuan		2
I.4 Sistematika Penulisan		3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN LALU.....		4
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD		4
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat		14
II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat		20
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		21

	II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	73
	III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	74
	III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	79
	III.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	82
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	83
BAB V	PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.....	8
2. Pencapaian Kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat	17
3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.....	22
3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	36
4. Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	109

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2023, yang memuat arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan satu tahun. Rencana kerja ini sekaligus menjadi komitmen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat yang merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun berjalan. Hal ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2025
7. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ;

I.3 Maksud dan Tujuan

- I.3.1 Maksud penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terutama yang terkait dengan urusan Pekerjaan Umum.
- I.3.2 Tujuan penyusunan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2023 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja – PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- II.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- III.3. Tujuan dan Sasaran Renja - PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun lalu dan Capaian Renstra

OPD

Pada tahun 2021 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mengelola anggaran sebesar Rp. 126.560.645.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Adapun realisasi belanja atau penyerapan dana Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 123.341.341.450,76 atau 97,46 %

Capaian pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Rp. 7.012.350.000 dengan realisasi Rp. 6.424.686.052 (91,62 %)
dengan realisasi pelaksanaan 100 %.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Anggaran Rp. 4.867.803.000 dengan realisasi anggaran Rp. 4.716.627.545 (96,89 %) dengan realisasi pelaksanaan 100 %
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Anggaran Rp. 3.374.322.000 dengan realisasi anggaran Rp. 3.374.322.000 (100 %) dengan realisasi pelaksanaan 100%.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Anggaran Rp. 1.638.820.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.627.559.100 (99,31 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100%

5. Program Pengembangan Permukiman
Anggaran Rp. 7.701.501.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 7.623.786.150,- (98.99 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100 %
6. Program Penataan Bangunan Gedung
Anggaran Rp. 18.363.870.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.205.498.434,- (93,69 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 97 %
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Anggaran Rp. 2.040.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.708.772.800,- (83.74 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100%.
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Anggaran Rp. 67.789.992.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 67.331.585.650,76 (99.32 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100 %.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Anggaran Rp. 204.923.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 129.356.000,- (63,12 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100 %
10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Anggaran Rp. 2.154.320.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.123.591.000,- (98,57 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100 %
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Anggaran Rp. 9.312.144.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.977.689.519,- (96,41 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100 %

12. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Anggaran Rp. 2.100.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.097.867.200,- (99,90 %) dengan realisasi pelaksanaan fisik 100 %.

Adapaun faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target pelaksanaan Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 adalah :

Pelaksanaan kegiatan yang tidak selesai tepat waktu yang 2022.

Saran untuk tidak terjadi pada tahun anggaran 2022 adalah :

- Mempersiapkan dokumen perencanaan lebih awal yaitu satu tahun sebelumnya, sehingga kegiatan akan dilaksanakan lebih cepat pada awal tahun anggaran.
- Melaksanakan pengawasan kegiatan lebih intensif sehingga dapat meminimalisir keterlambatan kegiatan.

Tabel 1
Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sampai dengan Tahun 2021
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Ususan / Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Renstra SKPD Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program SKPD Tahun 2020			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2021		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1 03 01	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5-7÷9)	11=(10/4)×100	12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
		Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1 03 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat	60	12	12	12	100	12	36	60,00	
1 03 01 02	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Sumber Daya Air dan Listrik	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 05	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 06	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 07	-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 08	-Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan kantor	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 12	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya komponen listrik / penerangan bangunan kantor	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 15	-Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang - Undangan	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 18	-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 19	-Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 01 20	-Pelayanan Administrasi Perkantoran Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	60	12	12	100	100	12	36	60,00	
1 03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR										
		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1 03 02 03	-Pembangunan Gedung Kantor	Tercapainya pembangunan gedung yang lebih baik dan bermanfaat	5	1	1	0,00	0,00	1	2	40,00	
1 03 02 05	-Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	2	1	1	0,00	0,00	1	2	100,00	
1 03 02 07	-Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah perengkapan gedung kantor yang diadakan	5	1	1	0,00	0,00	1	2	40,00	
1 03 02 09	-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5	1	1	100,00	100,00	1	3	60,00	
1 03 02 11	-Pembangunan Gedung Kantor (Bidang permukiman)	Jumlah gedung kantor (bidang permukiman) yang terbangun	5	1	1	100,00	100,00	1	3	80,00	
1 03 02 22	-Pengadaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang dipelihara	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00	
1 03 02 23	-Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Persentase mobil jabatan yang dipelihara	100	100	100	100,00	100,00	100	100	100,00	

1	03	23	04	- Penetapan kebijakan RDTR, RTRK dan RTBL - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan - Survey dan Pemetaan	Dokumen yang tersusun Dokumen yang tersusun Dokumen yang tersusun	10 Dok 4 Dok 5 Dok	2 0 1	2 0 1	100 0 100	2 0 1	100 0 100	2 0 1	4,00 1,00 2,00	40,00 25,00 40,00
1	03	23		PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	03	23	04	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Wilayah ber-IMB	11 Kec	100	100	100	100	100	100	100,00	80,00
1	03	23	06	- Pemanfaatan Ruang	Luasan pemanfaatan ruang	430 M2	100	100	100	100	100	100	100,00	80,00
1	03	23		PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA IBADAH	Persentase tempat ibadah per satuan penduduk	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
1	03	23	04	- Pembangunan sarana dan prasarana ibadah	Jumlah tempat ibadah yang terbangun	250 Unit	0	0	0	0	0	100	100,00	80,00
1	03	23		PROGRAM PENERANGAN LAMPU JALAN	Cakupan lingkungan yang aman dan sehat yang didukung dengan PSU / Lampu Jalan	80,19 %								
1	03	23	04	- Penerangan lampu jalan	Jumlah tempat ibadah yang terbangun	80,19 %								
1	03	31		PROGRAM PERENCANAAN, PENGAWASAN, PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	32 Paket	8	0	0	0	0	8 Paket	8 Paket	8 Paket
1	03	31	01	- Survey dan Desain	Ratio Rumah layak huni	32 Dok	8	0	0	0	0	8	8	25
1	03	23		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah layak huni	84%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	23	04	-Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah pengembang perumahan	100 %								
1	03	23	06	-Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Negara	Jumlah rumah negara yang layak huni	100 %								
1	03	23	11	- Pengembangan perumahan	Jumlah rumah layak huni	416 Unit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	23		PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA /RELOKASI / SOSIAL	Ratio Rumah layak huni	70%	-	-	-	-	-	-	-	-
1	03	23	04	-Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat bencana	Jumlah pengembang perumahan	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-
1	03	23	06	-Fasilitas dan Stimulasi Rehabilitasi rumah akibat Relokasi Program Pemda	Jumlah rumah negara yang layak huni	50 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
1	09	16		PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase lahan yang tertata kepemilikan dan pemanfaatannya	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyediaan Izin Lokasi	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-
				- Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	09	16		PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Ratio TPU persatuan penduduk	100%								
				- Pengelolaan Areal Pemakaman	Jumlah areal pemakaman yang tertata	9 Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-
1	09	16		PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK - KONFLIK PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara	100%								
				- Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang terselesaikan	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-
1	09	16		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI KECIPTAKARYAAN	Penyelesaian kasus tanah negara	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				- Pengembangan Data / Informasi	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang terselesaikan	100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	09	16		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Sertifikasi Tenaga Ahli	100%	-	-	-	-	-	-	50,00%	100,00%
				- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga ahli yang bersertifikasi	500 orang	-	-	-	-	-	-	50,00	100,00

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Tata Ruang Kabupaten
- b. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kabupaten
- c. Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk penerbitan IMB di wilayah daerah Kabupaten
- d. Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di daerah Kabupaten
- e. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di daerah Kabupaten
- f. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten
- g. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten
- h. Penyelenggaraan Pembangunan Jalan Kabupaten
- i. Penyelenggaraan Pembangunan Jembatan Kabupaten

Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Indikator Kinerja terhadap program, kegiatan pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Indikator kinerja yaitu Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum indikator kinerja yaitu Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator kinerja yaitu Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan indikator kinerja yaitu Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat.
5. Program Pengembangan Permukiman dengan indikator kinerja yaitu Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah
6. Program Penataan Bangunan Gedung dengan indikator kinerja yaitu Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Dengan indikator kinerja yaitu Persentase bangunan yang tertata
8. Program Penyelenggaraan Jalan
Dengan indikator kinerja yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Dengan indikator kinerja yaitu Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat
10. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Dengan indikator kinerja yaitu Cakupan ketersediaan rumah layak huni
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Dengan indikator kinerja yaitu Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan

12. Program Penyelesaian ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Dengan indikator kinerja yaitu Persentase Luas tanah yang dibebaskan

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	60%		56,00%	59,00%	61,00%	61,00%	56,00%	59,00%	61,00%	61,00%	61,00%	
2	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	-		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100%		93,40%	96,50%	100,00%	100,00%	93,40%	96,50%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%		90,15%	95,27%	100,00%	100,00%	90,15%	95,27%	100,00%	100,00%	100,00%	
5	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	-		7,00%	8,00%	10,00%	10,00%	7,00%	8,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
6	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	-		60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	70,00%	
7	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Persentase bangunan yang tertata	-		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
9	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	-		-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
10	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-		-	100,00%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
11	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	-		-	75,45%	100,00%	100,00%	-	75,45%	100,00%	100,00%	100,00%	

II.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang dan memenuhi standar keselamatan jalan dan jembatan serta berwawasan lingkungan.
- 2). Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.
- 3). Belum optimalnya kondisi infrastruktur perdesaan di kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah.
- 4). Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- 5). Adanya kerusakan jalan akibat muatan berlebih (over loading)

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rencana kerja (RENJA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan rancangan awal RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023. Di dalam rencana kerja tersebut tersusun atas hasil musrenbang, hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang, program dan kegiatan prioritas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat serta dari Pemangku Kepentingan lainnya.

Dalam rancangan awal RKPD, dasar penetapan pagu sementara yang diberikan sangat terbatas dan belum sesuai dengan sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Sidenreng Rappang. Jika dilakukan kajian penyempurnaan rancangan awal terhadap kebutuhan anggaran untuk sarana dan prasarana jalan dan jembatan saat ini. Maka akan terlihat kebutuhan untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dalam lampiran Matriks Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RIKPD TAHUN 2023
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp. 000)	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp. 000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Panglajene Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	7.055.301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Panglajene Sidenreng	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	100	7.055.301	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	70.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	70.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	4	10.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	4	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	10.000	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Panglajene Sidenreng	Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	10.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5	10.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5	10.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	10.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	10.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	5.356.843	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Panglajene Sidenreng	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	5.356.843	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Panglajene Sidenreng	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	5.321.843	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Panglajene Sidenreng	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	5.321.843	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Panglajene Sidenreng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	20.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengajiane Sideneng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	15.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengajiane Sideneng	18	Laporan	35.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengajiane Sideneng	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik	100	Persen	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengajiane Sideneng	100	Persen	-
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengajiane Sideneng	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Bulan	-		Pengajiane Sideneng	12	Bulan	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengajiane Sideneng	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	Bulan	-		Pengajiane Sideneng	12	Bulan	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengajiane Sideneng	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	604.019	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengajiane Sideneng	100	Persen	604.019
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batu Lappa	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	10.150		Batu Lappa	1	Paket	10.150
	Penyediaan Peralatan dan Perengalapan Kantor	Pengajiane Sideneng	Jumlah paket Peralatan dan Perengalapan yang disediakan	0	Paket	-		Pengajiane Sideneng	0	Paket	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengajiane Sideneng	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	8.869		Pengajiane Sideneng	1	Paket	8.869
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Pengajiane Sideneng	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	1	Paket	70.000		Pengajiane Sideneng	1	Paket	70.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengajiane Sideneng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	Dokumen	15.000		Pengajiane Sideneng	5	Dokumen	15.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengajiane Sideneng	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Laporan	500.000		Pengajiane Sideneng	130	Laporan	500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengajiane Sideneng	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengajiane Sideneng	100	Persen	-
	Pengadaan Mebel	Pengajiane Sideneng	Tersedianya mebel	10	Unit	-		Pengajiane Sideneng	10	Unit	-
	Pengadaan Surana dan Praasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengajiane Sideneng	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	Unit	-		Pengajiane Sideneng	20	Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengajiane Sideneng	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	480.903	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengajiane Sideneng	100	Persen	480.903
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengajiane Sideneng	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	650	Laporan	7.983		Pengajiane Sideneng	650	Laporan	7.983
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengajiane Sideneng	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	Laporan	232.020		Pengajiane Sideneng	12	Laporan	232.020
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengajiane Sideneng	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	240.900		Pengajiane Sideneng	12	Laporan	240.900

Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	Panglajene Sidreneng	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	543.535	Pemerintahan Daerah	Panglajene Sidreneng	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	543.535
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Panglajene Sidreneng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	256.325	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Panglajene Sidreneng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15 Unit	256.325
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Panglajene Sidreneng	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12 Unit	237.210	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Panglajene Sidreneng	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12 Unit	237.210
	Pemeliharaan Mebel	Panglajene Sidreneng	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	-	Pemeliharaan Mebel	Panglajene Sidreneng	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Panglajene Sidreneng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Panglajene Sidreneng	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Panglajene Sidreneng	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	50.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Panglajene Sidreneng	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	50.000
2	PROGRAM PENWELINGGABAHAN JALAN	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 Persen	69.809.186	PROGRAM PENWELINGGABAHAN JALAN	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61 Persen	69.809.186
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	61 Persen	69.809.186	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	61 Persen	69.809.186
	Pembangunan Jalan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Panjang jalan yang dibangun	30 Km	46.561.525	Pembangunan Jalan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Panjang jalan yang dibangun	30 Km	46.561.525
	Rehabilitasi Jalan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	panjang jalan yang direhabilitasi	20 Km	19.921.130	Rehabilitasi Jalan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	panjang jalan yang direhabilitasi	20 Km	19.921.130
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	20 Km	2.893.632	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	20 Km	2.893.632
	Pembangunan Jembatan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M	432.900	Pembangunan Jembatan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah Jembatan yang dibangun	10 M	432.900
	Rehabilitasi Jembatan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	12 M	-	Rehabilitasi Jembatan	Tersabar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	12 M	-
3	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Panglajene Sidreneng	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	100 Persen	100.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Panglajene Sidreneng	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	100 Persen	100.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Panglajene Sidreneng	Persentase Tenaga terampil yang terlatih	100 Persen	100.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Panglajene Sidreneng	Persentase Tenaga terampil yang terlatih	100 Persen	100.000
	Penyapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Panglajene Sidreneng	Jumlah Instruktur / Asesor / pelaksana pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analis yang disiapkan	-	-	Penyapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Panglajene Sidreneng	Jumlah Instruktur / Asesor / pelaksana pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analis yang disiapkan	-	-

	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pengaji Sistem	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	50	Orang	100.000			Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang mengikuti pelatihan	100.000			
	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Pengaji Sistem	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	-	-	-			Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	-			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengaji Sistem	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara	0	Persen	-			Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara	0	Persen		
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pengaji Sistem	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	0	Dokumen	-			Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	0	Dokumen		
	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Pengaji Sistem	Jumlah data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi	-	-	-			Jumlah data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi	-	-		
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengaji Sistem	Persentase pemanfaatan jasa konstruksi	-	-	-			Persentase pemanfaatan jasa konstruksi	-	-		
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengaji Sistem	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	-	-	-			Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	-	-		
10													
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100	Persen	5.281.003			Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100	Persen	5.281.003	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100	Persen	5.281.003			Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100	Persen	5.281.003	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	1	Dok	150.000			Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	1	Dok	150.000	
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah konsultasi supervisi pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM	0	Dok	-			Jumlah konsultasi supervisi pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM	0	Dok	-	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun	57	Liter/ detik	-			Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun	57	Liter/ detik	-	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya / SPAM berbasis masyarakat	57	SR	-			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya / SPAM berbasis masyarakat	57	SR	-	

	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	60	Liter/ detik	400/52	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	60	Liter/ detik	400/52
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum	400	SR	2.314.235	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum	400	SR	2.314.235
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	120	SR	1.216.016	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	120	SR	1.216.016
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum	50	SR	1.200.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum	50	SR	1.200.000
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	-		-	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	-		-
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM bukan jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	-		-	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM bukan jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	-		-
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah kelompok masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	-		-	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah kelompok masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	-		-
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-		-	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-		-
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM berbasis masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-		-	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Jumlah unit SPAM berbasis masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-		-
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Warga Negara Yang Memeroleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	Persen	7.447.532	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Warga Negara Yang Memeroleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	Persen	7.447.532
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Rumah Tinggal Bersantiaji	100	Persen	7.447.532	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Kabupaten Sidreneng Rappang	Persentase Rumah Tinggal Bersantiaji	100	Persen	7.447.532
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengajiane Sidreneng	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dab teknis SPALD dalam daerah Kabupaten / Kota yang disusun	0	Dok	-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengajiane Sidreneng	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dab teknis SPALD dalam daerah Kabupaten / Kota yang disusun	0	Dok	-
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pengajiane Sidreneng	Jumlah dokumen supervisi kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	0		-	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pengajiane Sidreneng	Jumlah dokumen supervisi kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	0		-

	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersebar di Kab. Sidrap	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	-	-	-	Tersebar di Kab. Sidrap	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi	-	-																																																	
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Tersebar di Kab. Sidrap	Jumlah konsultasi supervisi kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT	-	-	-	Tersebar di Kab. Sidrap	Jumlah konsultasi supervisi kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT	-	-																																																	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang	Perentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	10	Persen	250.000	Tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang	Perentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembangunan Aliran Air Tidak Tersumbat	10	Persen	250.000																																																
												Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di Kabupaten Sidenreng Rappang	Perentase Drainase dalam Kondisi baik	10	Persen	250.000																																										
																		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Panglajene Sidenreng	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dab teknis sistem drainase perkotaan yang disusun	1	Dok	250.000																																				
																								Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah Outline Plan pada kawasan genangan yang disusun	0	Dok	-																														
																														Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah konsultasi supervisi Pembangunan / Peningkatan /rehabilitasi sistem drainase perkotaan	0	Dok	-																								
																																				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tersebar di 11 Kecamatan	Panjang saluran Drainase perkotaan yang dibangun	0	M	-																		
																																										Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersebar di 11 Kecamatan	Panjang saluran Drainase perkotaan yang ditingkatkan	0	M	-												
																																																Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tersebar di 11 Kecamatan	Panjang saluran Drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	0	-	-						
																																																						Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah Sarana Sistem Drainase perkotaan yang disediakan	0	-	-
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah konsultasi supervisi Pembangunan / Peningkatan /rehabilitasi sistem drainase lingkungan	0	-	-																																																						
						Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar di 11 Kecamatan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dibangun	0	-	-																																																
												Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Tersebar di 11 Kecamatan	Panjang saluran drainase lingkungan yang ditingkatkan	0	-	-																																										
																		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Tersebar di 11 Kecamatan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan rehabilitasi	0	-	-																																				
																								Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah Sarana Sistem Drainase lingkungan yang disediakan	0	-	-																														

	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah rencana, kebijakan, strategi ddb teknis sistem drainase lingkungan yang disusun	0					Jumlah rencana, kebijakan, strategi ddb teknis sistem drainase lingkungan yang disusun	Tersebar di 11 Kecamatan	0		
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	70	Persen	5.000.000			Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	Tersebar di 11 Kecamatan	70	Persen	5.000.000
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	70	Persen	5.000.000			Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah	Tersebar di 11 Kecamatan	70	Persen	5.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis Kabupaten / Kota	6	Sistem Jaringan	5.000.000			Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang dibangun di kawasan strategis Kabupaten / Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	6	Sistem Jaringan	5.000.000
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang diawasi dan dikendalikan di kawasan strategis Kabupaten / Kota	-					Jumlah sistem jaringan prasarana dan sarana permukiman yang diawasi dan dikendalikan di kawasan strategis Kabupaten / Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	-		
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Tersebar di 11 Kecamatan	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan	100	Persen	2.700.000			Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Tersebar di 11 Kecamatan	100	Persen	2.700.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan penerbitan peryaratan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1	Dok	300.000			Jumlah penyelenggaraan penerbitan peryaratan bangunan gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersebar di 11 Kecamatan	1	Dok	300.000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10	Dok	2.400.000			Jumlah dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	10	Dok	2.400.000
9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tersebar di 11 Kecamatan	Persentase bangunan yang tertata	100	Persen	-			Persentase bangunan yang tertata	Tersebar di 11 Kecamatan	100	Persen	-
		Tersebar di 11 Kecamatan	Persentase bangunan yang tertata	100	Persen	-			Persentase bangunan yang tertata	Tersebar di 11 Kecamatan	100	Persen	-

Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah supervisi penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	0 Kawasan	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah supervisi penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	0 Kawasan
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	0 kawasan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	0 Kawasan
Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil monitoring penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan	-	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil monitoring penataan / pemeliharaan bangunan dan lingkungan	-
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	100 Persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun	100 Persen
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kab/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	100 Persen	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTT) Kab/Kota	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	100 Persen
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	100 Persen	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	100 Persen
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	1 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten / Kota	1 Dok
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRR Kabupaten / Kota	0 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRR Kabupaten / Kota	0 Dok
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	0 Dok	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	0 Dok
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	0 Persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	0 Persen
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	0 Dok	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	0 Dok
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	0 Dok	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	0 Dok

11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersabar di 11 Kecamatan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	170.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersabar di 11 Kecamatan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100 Persen	170.000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	100 Persen	170.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	100 Persen	170.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten / Kota	1 Dok	170.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah Dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten / Kota	1 Dok	170.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0 Dok	-	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data rumah korban bencana Kabupaten / Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	0 Dok	-
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana Kabupaten / Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	-	-	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data rumah yang terkena bencana Kabupaten / Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	-	-
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten / Kota yang terverifikasi	-	-	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten / Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten / Kota yang terverifikasi	-	-
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah	0 Dok	-	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus	0 Dok	-
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	-	-	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	-	-
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten / Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten / Kota yang terbangun	-	-	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana Kabupaten / Kota atau yang terkena relokasi program Kabupaten / Kota yang terbangun	-	-
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase Rumah Susun yang difilela	-	-	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase Rumah Susun yang difilela	-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah laporan hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	-	-
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	-	-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus	-	-
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersabar di 11 Kecamatan	Persentase izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemberian Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepatan dengan pengembang / pelaku pembangunan rumah untuk pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Tersabar di 11 Kecamatan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemberian Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Tersabar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen kesepatan dengan pengembang / pelaku pembangunan rumah untuk pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--------------------------	--	--------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tesebar di 11 Kecamatan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100,00 Persen	600.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tesebar di 11 Kecamatan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100,00 Persen	600.000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Tesebar di 11 Kecamatan	Menurunya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha	100,00 Persen	600.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Tesebar di 11 Kecamatan	Menurunya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha	100,00 Persen	600.000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang	12 Unit Rumah	600.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	12 Unit Rumah	600.000
	Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen kesepakan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-	Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen kesepakan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen data penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tesebar di 11 Kecamatan	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	80,19 Persen	7.640.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tesebar di 11 Kecamatan	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	80,19 Persen	7.640.000
	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tesebar di 11 Kecamatan	Persentase PSU perumahan	80,19 Persen	7.640.000	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tesebar di 11 Kecamatan	Persentase PSU perumahan	80,19 Persen	7.640.000
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	0 Dok	-	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	0 Dok	-
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11 Koc	7.640.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tesebar di 11 Kecamatan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11 Kec	7.640.000
15	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Panglajene Siderng	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 Persen	249.200	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Panglajene Siderng	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 Persen	249.200
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Panglajene Siderng	Persentase Luas tanah yang dibebaskan	100 Persen	249.200	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Panglajene Siderng	Persentase Luas tanah yang dibebaskan	100 Persen	249.200

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Panglajene Sidemeng	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Ganti Kerugian dan Santunan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Dok	249.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Panglajene Sidemeng	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Dok	249.200
Jumlah											
107.002.223						Jumlah					
107.002.223											

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Uraian hasil kajian sebagaimana terlampir dalam Matriks Rencana Kerja yang diusulkan oleh masyarakat yang terakomodir melalui forum Musrembang Desa, Kecamatan dan SKPD serta Musrembang Kabupaten serta hasil Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang

No (1)	Program / Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Pembangunan / Peningkatan Jalan				
	Peningkatan jalan Mojong - Belawa	Kec. Watang Sidenreng		2 Km	D
	Jalan Beton Lanjutan Bulucenrana - Mampise	Kec. Pitu Riawa		2 Km	D
	Pembangunan jalan Mampise - Salo Callu	Kec. Pitu Riawa		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Salo Callu - Betao	Kec. Pitu Riase		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Batu Lemngo - Tabaro	Kec. Pitu Riase		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Botto - Salo Callu	Kec. Pitu Riase		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Salo Bukkkang - Kandiawang	Kec. Pitu Riawa		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Pallae - Bola Bulu	Kec. Pitu Riawa		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Bola Bulu - Betao	Kec. Pitu Riawa		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Tellang - Tellang - Abbokongeng	Kec. Pitu Riase		2 Km	D
	Pembangunan Jalan Pasar (Utara)	Kec. Kulo		2 Km	D
	Peningkatan Jalan Aspal Hotmix Ruas Betao - cempa	Kec. Maritenggae		2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Duampanua			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Kanie			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Kadidi			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Toddang Pulu			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Baula			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Lajonga			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Wete			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Puncak - Anrelle			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Galung aserae - Rs. Nene Mallomo			3.5 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Mampise - Karebosi			1 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Makkoring - Lasiwala			4 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Anabanae - Lasiwala			4 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Empagae - Salobompong			4 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Bulu - Lamangiso			4.4 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Sereang - Bacu Bacu			3 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Maluku - Bece			3 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Kanyuara - Bece			2 Km	D
	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Talumae - aka Akae			2.4 Km	D
				1.5 Km	D

Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Macege - Salokarae						1.5 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bapangi						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas SMA 2 Unggulan						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Kandiawang - Ajubissue						0.55 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Carawali - Cenrana						2.3 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Bapangi - Padaelo						2.5 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Ajubissue - Loka Batue						0.6 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Aka Akae - Salobompong						3 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Puncak - Bulu						6.5 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Botto - Salocallu						3.9 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Mario						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Rijang Panua						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bulu Wattang						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Timoreng Panua						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bina Baru						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Kulo						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bulu						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Cipotakari						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam desa Belawae						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Buntu Buangin						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Dengeng - Dengeng						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bola Bulu						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bila Riase						2.5 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Bila						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Kampale						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas Arawa - Pasar Batu Iappa						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Kalosi Alau						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Salobukkang						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Kalosi						0.5 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Kel. Salomallori						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Padang Loang						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Sumpang Mango						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Ponrangae						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Talumae						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Mojong						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Kanyuara						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Teppo						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Mattirotasi						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Desa Lainungan						1 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Batu Lappa						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Arawa						2 Km	D
Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Baula						2 Km	D

	Peningkatan jalan aspal Hotmix Ruas dalam Kel. Lawawoi				2 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Caddoang - Bola Petti				5.8 Km	D
	Peningkatan Jalan Beton Hotmix Ruas Compong - Caddoang				1.2 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Awotara - Lombo				1.7 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Compong - Awotara				4.4 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Buae - Pabbaresseng				7 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Cempa - Batareng				3.36 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Tabaro - Tana Toro				5 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Lemo - Tabaro				4 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Bulucenrana - Salo Dua (Enrekang)				2.2 Km	D
	Peningkatan jalan Beton Ruas Bila Riase - barukku				5.3 Km	D
	Peningkatan Jalan Beton Ruas Pangkajene - Empagae				8.8 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BILOKKA - WETE'E				4.7 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS TANRUTEDONG - KANDIAWANG				4.4 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS SOANGNGE - GALUNG ASERAE				1.95 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS KANYUARA - BECE				3.8 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BENDORO - BULO				11 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BOLA EPPAE - PATOMMO				3.7 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS KULO - ABBOKONGENG				4.15 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS LISE - ALLESALEWOE				4.85 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS KANIE - MALUKU				3.3 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS TACCIMPO - ALOSI LOSIE				5 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS PAJALELE - PERINYAMENG				1.9 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS KADIDI - MANISA				3.75 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BILARIASE - LAGADING				1 Km	D
	Peningkatan jalan beton Ruas Amparita - Buae				7.8 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS PAIRENG - KADIDI				3.05 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS GALUNG ASERAE - RS. NENE MALLOMO				1 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS LAWAWOI - ALITTA				0.4 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS SALOBUKKANG - KANDIAWANG				3.02 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BILOKKA - PAKKASALO				6.6 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BAPANGI - PADAELO				4.4 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS KALOSI - LONRA				7.7 Km	D
	Peningkatan Jalan Beton Ruas Batu Lappa - Carawali				5.6 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BOTTO - SALOCALLU				3.9 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BENTENG - TANGKOLI				1.75 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS BETAO - CEMPA				5.9 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS AKA AKA - SALOBOMPONG				3.15 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS SIMAE - BENTENG				1.25 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS ANABANNAE - LASIWALA				4.2 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS MAMPISE - KAREBOSI				5.7 Km	D
	PENINGKATAN JALAN BETON RUAS ALAKKUANG - WATANG LOWA				1 Km	D

Ruas Dalam Kelurahan Wala				3,0 Km	D
Ruas Dalam Kelurahan Rijang Pittu				3,0 Km	D
Ruas Dalam Kelurahan Lautang Benteng				3,0 Km	D
Ruas Dalam Kelurahan Majelling				3,0 Km	D
Ruas Dalam Kelurahan Majelling Watang				3,0 Km	D
Ruas Dalam Kelurahan Lakessi				3,0 Km	D
Ruas Waladeceng - Pinggir Danau				2,2 Km	D
Ruas Jalan Mangga				1,2 Km	D
Peningkatan jalan beton ruas Mampise - Salo Callu				2,7 Km	D
Jalan Beton Watang salo		Kel. Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng		5 Km	M
Pengaspalan Jalan Dusun		Dusun 2 Talumae		3 Km	M
Pembangunan Jalan Beton		Desa Mojong		1,5 Km	M
Rigit Awakaluku - Bampengge Kelurahan Tangkoli Kabupaten Wajo		Dusun IV Bampengge Desa Kalosi Alau		6 Km	M
Peningkatan Jalan Beton Jalan Sentosa		Lingkungan I Kelurahan Tanru Tedong		0,5 Km	M
Peningkatan Jalan Beton Jalan Pramuka		Lingkungan I Kelurahan Tanru Tedong		0,5 Km	M
Pembangunan Jalan Beton Lintas Desa Timoreng panua, Bulu Wattang, Bulu dan Cipotakari		Bulu Wattang		5 Km	M
Jalan Beton Mattirotasi - Buae		Desa Mattirotasi		1 Km	M
Jalan Beton Bola Tellue - Wajo		Desa Bila		10 km	M
Jalan Beton Bulu bila - Wajo		Desa Bila		10 km	M
Rabat Beton Poros Lombo - Kab. Wajo		Desa Lombo		4 Km	M
Rabat Beton Poros Desa Betao Riase - Tana Toro		Betao Riase		12 Km	M
Pembangunan Jalan Beton Ruas Dusun I dan II Desa Anabannae		Desa Anabannae		10 Km	M
Rabat Beton jalan batu - batu Puncak Harapan		Desa Mario		2,5 km	M
Rabat Beton Desa Polewali		Desa Polewali		4 km	M
Pembangunan jalan beton jalan Andi Nohong		Kel. Panreng		3 Km	M
Rabat Beton dusun Tonrong Lautang Desa Tonrongge		Desa Tonrongge		0,2 Km	M
Rabat Beton jalan poros Talawe, Damai, TalumaeDusun Bulu Kunyi		Talawe		12 Km	M
Rabat Beton jalan poros Damai ke Aka - Akae		Desa Damai		2 Km	M
Rabat Beton jalan poros Damai - Lasiwala depan SMP 2 Wt. Sidenreng		Desa Damai		1,5 Km	M
Rabat Beton jalan Labuleng Desa Simpo		Desa Passeno		1 Km	M
Pembangunan jalan beton Watang Salo		Kel. Sidenreng		4 Km	M
Jalan Beton Jl. Ellepellengge Desa Cipotakari		Cipotakari		2 Km	M
Pembangunan jalan beton Perbatasan Kanie - Kadidi		Kanie		2 Km	M
Pembangunan Jalan Beton Sereang - Kel. Wala		Sereang		1,5 Km	M
Pembangunan Jalan Beton Sereang - Kanyuara		Sereang		4 Km	M
Pembangunan Jalan Beton Majelling - desa Sereang		Sereang		1 Km	M
Rabat Beton Dusun II, III dan IV		Desa Botto		2 Km	M

	4 Kec	4 Paket	D
DED Drainase Kec. Maritenggae, Panca Rijang, Baranti dan Tellu Limpoe	Lingk. I Kanyuara	2 km	M
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Kec. Panca Rijang	1 Km	M
Pemb. Drainase Kel. Maccorawalie	Lingk. I dan Lingk. II Kel. Empagae	3 Km	M
Pembangunan dan Rehab Berat Drainase	Dusun I, II dan III Desa Damai	6 Km	M
Pembangunan Drainase Masing 2 KM di 3 Dusun	Desa Damai	Ls	M
Pembangunan Drainase Lingkar Passitangeng - Salobompong	Desa Mojong	1, 5 Km	M
pembangunan Drainase	Lingkungan I & II Kelurahan Tanru Tedong	0,9 Km	M
Drainase	Lingk. I, II & III Kelurahan Salomallori	20 Km	M
Drainase	Desa Bulu	1,5 Km	M
Pembangunan Drainase lapangan Sepak Bola Desa Bulu	Kel. Kadidi	1,5 Km	M
Drainase sebelah Barat jalan poros Kadidi - kanie	Desa mario	1,4 Km	M
Pembuatan Drainase Jalan Pabrik + Duekker	Dua Pitue	2 Km	M
Pembangunan Drainase Awakaluku - Pakkatengge Desa Kalosi Alau	Pitu Riawa	3 Km	M
Pembangunan drainase dalam Desa Otting	Watang Sidenreng	6 Km	M
Drainase Sepanjang Jalan poros Mojong	Watang Sidenreng	0.12 Km	R
Drainase dalam Kel. Kanyuara	Kel. Maccorawalie	2 km	M
Drainase Jalan Poros Pangkajene ke Rappang	Kel. Lawawoi	2 Km	M
Drainase Jalan Poros Pare	Desa Bapangi	1,5 Km	M
Pembangunan Drainase Untuk Jalan Poros Dusun Bingkulu	Kalosi	4 Km	M
Pembangunan Drainase Jalan Poros Sengkang	Padang Loang	1 Km	M
Drainase Jalan Provinsi Depan Kantor Desa Padangloang	Kel. Massepe	2 Km	M
Pembangunan Drainase Jalan Poros Soppeng Massepe	Talumae	2 Km	M
Lanjutan Drainase Dusun I dan RW 3 Desa Talumae	Desa Buae	0,5 Km	M
Drainase Paosadae - Takkalasi desa Buae	Wanio Timoreng	2 Km	M
Drainase Bilokka - Wettee	Desa Lagading	0,4 Km	M
Drainase Lapangan Sepak Bola dusn I Lagading	Kel. Massepe	1 Km	M
Drainase Jalan Alauddin Massepe	Kulo	10 Km	M
Pembangunan Drainase Desa Mario - Desa Bina Baru	Kel. Lakessi	1 Km	M
Pembangunan Drainase Jl. Anton Sujarwo (Seb. Barat Stadion)	Desa Mojong	3 Km	M
Drainase sepanjang Jalan Poros Rappang desa Mojong	Allakuang	2 Km	M
Drainase Jalan Poros Soppeng allakuang	Kel. Benteng	2 Km	M
Drainase Jalan Poros Pare Cailaccu	Desa Tanete	2 km	M
Drainase Jalan Poros Soppeng Tanete	Bonginge Dea Desa Sipodeceng	1 Km	M
Pembangunan Drainase Saluran Perbatasan Bonginge Dea		1 Km	M
Pembangunan Drainase dalam Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe		1 Km	M
Pembangunan Drainase dalam Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu		1 Km	M
Pembangunan Drainase dan Dekker Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritenggae		1 Km	M
Pembangunan Drainase dan Gorong Gorong Kelurahan Wettee		1 Km	M
Pembangunan Drainase Dusun IV Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa		1 Km	M

	Pengembangan jaringan distribusi pipa air bersih pekerjaan pembuatan IPA paket 25 L/Detik IKK Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	1 Ls	D
	Peningkatan Kap.Sistem terpasang pek.pengadaan/pemasngn Pompa Centrifugal Single Stage Close Kap.20L,head 120m,daya motor 37,5kw lengkap dgn kaedari pane	Kec. Panca Rijang	2 Unit	D
		Kec. Pitu Riawa		
	Peningkatan Kap.Sistem Terpasang Pek.Pengadaan/pemas.Pompa Centrifugal Single Stage Close Kap.20L,head 120m,daya motor 37,5 kw lengkap dgn kaedari panel	Kec. Dua Pitue	2 Unit	D
	Peningkatan Kapasitas Sistem Terpasang Pekerjaan Pengadaan/pemasangan Hidra Umum		5 Unit	D
	Peningkatan Kapasitas Sistem Terpasang Pengadaan dan Pemasangan Genset IKK	Kec. Panca Rijang	3 Ls	D
		Kec. Kulo		
		Kec. Watang Sidenreng		
	Peningkatan Kapasitas sistem terpasang pekerjaan intake pengambilan IKK	Kec. Pitu Riase	2 Ls	D
		Kec. Pitu Riawa		
	Peningkatan Kapasitas Sistem Terpasang Pekerjaan Intake Pengambilan IKK	Kec. Baranti	2 Ls	D
		Kec. Kulo		
	Perluasan dan Peningkatan Rumah (SR) IKK Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang	2000 Unit	D
	Perluasan dan peningkatan rumah (SR) IKK	Kec. Watang Pulu	4000 Unit	D
		Kec. Watang Sidenreng		
	Pengembangan Jaringan distribusi,Bak Reservoir,Pompa,Pipa air dan pengeboran 3" Kec.Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	2000 Meter	D
	Pengembangan Jaringan Pipa air bersih 3" Kec.Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	800 Meter	D
	Pengembangan jaringan pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa Gip 75 mm IKK Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	2000 Meter	D
	Pengembangan Jaringan Pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa GIP 75 mm IKK Kec. Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	2000 Meter	D
	Pengembangan Jaringan Pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa GIP 100 mm IKK Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	700 Meter	D
	Pengembangan jaringan distribusi pipa air bersih pekerjaan pembuatan IPA paket 25 L/D IKK Kec. Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	1 Ls	D
	Pengembangan Jaringan Pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa GIP 200 mm IKK	Kec. Pitu Riawa	800 Meter	D
	Pengembangan jaringan distribusi pipa air bersih 3" Dsn 1 Bola Petti Kel. Leppangeng Kec. Pitu Riase	Kel. Leppangeng Kec. Pitu Riase	800 Meter	D
	Pengembangan Jaringan distribusi, Bak Reservoir,Pompa,Pipa Air dan Pengeboran 3"	Kec. Pitu Riawa	4000 Meter	D
		Kec. Pitu Riase		
	Pengembangan Jaringan Distribusi pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa Gip 75 mm IKK Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	2000 Meter	D
	Pengembangan Jaringan Distribusi pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa Gip 150 mm IKK Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	6000 Meter	D
	Pengembangan Jaringan Distribusi pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa Gip 100 mm IKK Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	700 Meter	D
	Pengembangan Jaringan pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa GIP 200 mm IKK Pitu Riase	Kec. Pitu Riase	800 Meter	D
	Pengembangan Jaringan Pipa air bersih pengadaan/pemasangan pipa GIP 150 mm IKK Kec. Pitu Riawa	Kec. Pitu Riawa	6000 Meter	D
	Pengembangan Jaringan distribusi pipa air bersih 3" SPAM	Kec. Tellu Limpoe	13 Ls	D
	Perluasan Jaringan distribusi pipa air minum kel. Ulu Ale	Kec. Watang Pulu	160 SR	D

Perluasan jaringan distribusi pipa air minum kel. Arawa	Kec. Watang Pulu	160 SR	D
Perluasan jaringan distribusi pipa air minum Desa Wanio Timoreng	Kec. Panca Lautang	160 SR	D
Perluasan jaringan distribusi pipa air minum Kel. Lakessi	Kec. Maritengngae	140 SR	D
Perluasan jaringan distribusi pipa air minum Kel. Kanie	Kec. Maritengngae	140 SR	D
Perluasan jaringan distribusi pipa air minum Desa Takkalasi	Kec. Maritengngae	140 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kel. Kanyuara	Kec. Watang Sidenreng	96 SR	D
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Ajubissue	Kec. Pitu Riawa	96 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Timoreng Panua	Kec. Panca Rijang	84 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Dongi	Kec. Pitu Riawa	84 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kel. Bangkai	Kec. Watang Pulu	84 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kel. Baula	Kec. Tellu Limpoe	115 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Kel. Batu	Kec. Pitu Riase	84 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Lombo	Kec. Pitu Riase	44 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Buntu Buangng	Kec. Pitu Riase	75 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Belawae	Kec. Pitu Riase	75 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Lagading	Kec. Pitu Riase	75 SR	D
Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Compong	Kec. Pitu Riase	75 SR	D
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Desa Leppangng	Kec. Pitu Riase	75 SR	D
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kec. Pitu Riase	144 SR	D
Pembangunan Sarana Air Bersih	Dusun I, II, III Desa Dengeng-dengeng		M
	Dusun I dan II Desa Ajubissu	2 unit	M
Pengadaan Air Bersih Kantor Kelurahan (Bor) Jalan Badak	Jalan Badak Kelurahan lautang Benteng	1 unit	M
Pembangunan SPAM di Kawasan Taman Religius Nona Nonae		1 Paket	D
Pembangunan Sumur Bor Massepe 3 Titik		1 Paket	D
Pengadaan Mesin Celup Pompa Air dan Perpipaian Air Bersih		1 Paket	D
Pengeboran Sumur Bor dan Pompa Cipotakari Desa Cipotakari		1 Paket	D
Pengeboran sumur dan pompa Mario Desa Bilokka		1 Paket	D
Kelurahan Bangkai Kec. Watang Pulu		65 SR	D
Kelurahan uluale Kec. Watang Pulu		64 SR	D
			D
Desa Betao Riase Kec. Pitu Riawa		40 SR	D
Desa Bola Bulu Kec. Pitu Riase		70 SR	D
Desa Botto Kec. Pitu Riase		61 SR	D
Desa Kanie Kec. Maritengngae		70 SR	D
Desa Leppangng Kec. Pitu Riase		77 SR	D
Desa Lombo Kec. Pitu Riase		92 SR	D
Desa Passeno Kec. Baranti		40 SR	D
Desa Rijang Panua Kec. Kulo		60 SR	D
Desa Tomrongge Kec. Baranti		70 SR	D
Desa Sumpang Mango Kec. Pitu Riawa		60 SR	D
Kelurahan Lawawoi Kec. Watang Pulu		73 SR	D
Kelurahan Panreng Kec. Baranti		30 SR	D

4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 150 KK							
	Desa Bapang/ Kecamatan Panca Lautang					50 Unit		D
	Desa Bila Kecamatan Dua Pitue					50 Unit		D
	Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase					50 Unit		D
	Desa Dengeng-Dengeng Kecamatan Pitu Riase					52 Unit		D
	Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue					50 Unit		D
	Desa Leppangeng Kecamatan Pitu Riase					55 Unit		D
	Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase					55 Unit		D
	Desa Maddenra Kecamatan Kulo					50 Unit		D
	Desa Taccimpo Kecamatan Dua Pitue					50 Unit		D
	Desa Talumae Kecamatan Wattang-Sidenreng					50 Unit		D
	Desa Tanatoro Kecamatan Pitu Riase					55 Unit		D
	Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang					50 Unit		D
	Kelurahan Batu Kec. Pitu Riase					50 Unit		D
	Kelurahan Salomallori Kec. Dua Pitue					52 Unit		D
	Pembangunan tangki septik Hibah Air Limbah Setempat							D
	Pembangunan tangki septik tersebar kab. Sidenreng Rappang					317 Unit		
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
	Rabat beton lintas Lainungan- Bangkai-Uluale	Desa Lainungan				2 Km		M
	Betonisasi/ jalan desa Mattirotasi, Lainungan, Buae	Desa Mattirotasi				10 Km		M
	Pembangunan Jalan Beton ke Aka Akae	Timoreng Panua				2.5 Km		M
	Rabat Beton Bilokka ke Cenrana	Panca Lautang				1 Km		M
	Rabat Beton Desa Polewali	Polewali				4 Km		M
	Pembangunan Jalan Beton Desa Mario	Kulo				1 Km		M
	Pembangunan Jalan Beton Desa Maddenra	Kulo				2.5 Km		M
	Pembangunan Jalan Beton Mario - Bina Baru	Kulo				8 Km		M
	Rabat Beton Jalan Beton Pakkasalo Dusun II Desa Kalosi	Dua Pitue				3.5 km		M
	Rabat Beton Dusun I dan III Desa Sereang	Maritengngae				4 Km		M
	Beton Ji. A. Cammi Kel. Rijang Pittu	Maritengngae				0.55 Km		M
	Rabat Beton Lingk. III Kel. Majelling Wattang	Maritengngae				0.1 Km		M
	Peningkatan Jalan Cor Pakenya - Pajalele - Magetang	Maritengngae				4 Km		M
	Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Dusun II, III dan IV Lombo - Compong	Pitu Riase				2 Km		M
	Jalan Beton Compong - Barukku Desa Compong	Pitu Riase				12 Km		M
	Jalan Beton Compong - Lombo	Pitu Riase				0.3 Km		M
	Jalan Beton Dusun IV Compong	Pitu Riase				0.2 Km		M
	Pemeliharaan Rabat Beton Compong	Pitu Riase				0.6 Km		M
	Pengecoran Beton Carillo Batu Ompong Desa Leppangeng	Pitu Riase				1 Km		M
	Pembangunan Jalan Beton Kab. Sidrap - Kab. Enrekang	Pitu Riase				5 Km		M
	Pembangunan Jalan Beton tersebar di desa Tana Toro	Pitu Riase				5 km		M
	Pembangunan Jalan rabat Desa Buntu Buangi	Pitu Riase				0.6 Km		M

Peningkatan Jalan antara Desa Talumae ke Desa Damai	Rw 01 Dusun I Talumae ke Desa Damai				M
Pengerasan/Rehab Jalan Poros Kanyuara - Walatedong	Kelurahan Kanyuara			2,5 Km	M
Peningkatan Jalan Awaluku - Bampeng Kelurahan Tangkoli Kabupaten Wajo	Dusun I & II Desa Kalosi Alau			4 Km	M
Peningkatan Jalan Yang Menghubungkan Palapparae Kelurahan Salomallori Dengan Kelurahan Lancrang Kecamatan Pitu Riawa				5500 M	M
Peningkatan Jalan Samping Lapangan Batu2 - Mercu Buana	LK III Kel. Salomallori			5 Km	M
Perintisan Jalan Dusun III Td.Paberre	Desa Mario			2 Km	M
Peningkatan Jalan/Pengkrikilan Jalan Lingkungan Cenrana Kadidi	Desa Lainungan			1,5 Km	M
Peningkatan Jalan/Pengkrikilan Jalan RK I, Lingkungan Makkawarue Kadidi	Kelurahan Kadidi			1 Km	M
Peningkatan Jalan/Pengkrikilan Jalan di Belakang SMP Kadidi	Kelurahan Kadidi			700 M	M
Peningkatan Jalan Poros Mario	Kelurahan Kadidi			500 M	M
Perintisan Jalan Samping Sawah Norma Sampai Bulu Wattang	Desa Bulu Wattang			2 Km	M
Pembangunan jalan Anabannae-Lasiwala	Desa Bulu				M
Pengkrikilan Desa Lasiwala-Anabannae-Rappang	Desa Anabannae			4,5 Km	M
Peningkatan Jalan Penghubung Desa Lasiwala-Sumpang Mango	Desa Lasiwala			8 Km	M
Peningkatan Jalan	Desa Lasiwala			4 Km	M
Peningkatan Jalan	Lingkungan I dan II Kelurahan Lajonga			3 Km	M
Peningkatan Jalan	Lingkungan I dan II Desa Wettee			2000 m	M
Peningkatan Jalan + Talud Ke Jawi-jawi	Desa Corawali			3000 m	M
Pengerasan ruas Tanrutedong - Compong - Larompong	Dusun Bapangi Desa Bapangi			1500 m	M
Ruas Buae - Mattirotasi - Lendong - Tassiso - Batas Pare Pare				12 Km	M
Ruas Bapangi - Padaelo - Lajonga				4,5 Km	M
Ruas Pakkasalo - Bukere				7 Km	M
Rabat Beton				5 Km	M
Pembangunan Rabat Beton jalan Penghubung antar Desa	Lingk. I Kanyuara			1,5 Km	M
Pembangunan Rabat Beton Jalan Alternatif dalam Ibukota Kecamatan	Kelurahan Empagae			1,5 Km	M
Pemasangan Paving Blok Lingkungan I Sidenreng	Kelurahan Empagae			2 Km	M
Pemasangan Paving Blok Lingkungan II Walatedong	Kel. Sidenreng, Kec. Wata			1 Km	M
Rabat Beton jalan Lingk. sepanjang 2 Km di Lk II Walatedong	Kel. Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng			700 M	M
Rabat Beton jalan Lingk. sepanjang 2 Km di Lk I Sidenreng	Kel. Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng			2 Km	M
Pembangunan Rabat Beton	Kel. Sidenreng, Kec. Watang Sidenreng			2 Km	M
Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk dan perdesaan	Desa Talumae ke Desa Damai			2 Km	M
Rabat Beton Pakkasalo - Bampengge	Desa Mojong			3 Km	M
Rabat Beton Jln tani Penghubung Dsn I ke Dsn II	Dusun III Pakkasalo dan Dusun IV Bampengge Desa Kalosi Alau			1,7 Km	M
	Dsn I dan Dsn II Desa Talawe			4 Km	M

Rabat Beton Jln Poros Talawe-Damai	Jln Poros Talawe-Damai	3 Km	M
Rabat Beton Desa Damai - Talumae, Damai - Aka-AkaE	Desa Talawe	6 Km	M
Lanjutan Rabat beton Damai - Aka-Akae	Desa Damai	3 Km	M
Rabat beton	Jl. Mattarimae Dusun I Desa Padangloang	1,5 Km	M
Rabat Beton	Jl. Cendrawasih Dusun III Desa Padangloang	200 M	M
Rabat Beton Tersebar Kec. Maritengngae	Kec. Maritengngae	3 Km	M
Rabat Beton Tersebar Kec. Panca Rijang	Kec. Panca Rijang	3 Km	M
Rabat Beton Tersebar Kec. Watang Pulu	Kec. Watang Pulu	3 Km	M
Rabat Beton Lorong I Kel Arawa	Kec. Watang Pulu	1 Km	M
Rabat Beton Lingk. I I Bojoe Kel Arawa	Kec. Watang Pulu	1 Km	M
Rabat Beton Desa Passeno	Kec. Baranti	1 Km	M
Rabat Beton Lingkungan II Kel Tanru Tedong	Kec. Tanru Tedong	1 Km	M
Rabat Beton Kel. Pajalele, Kel. Massepe	Kec		
Paving Blok Halaman Kantor Desa Padangloang	Jl. Kesehatan Dusun I Desa Padangloang	400 M	M
Rabat Beton Salomallori - Pannyingkulu	Lingk. I & II Kelurahan Salomallori	10 Km	M
Pemasangan Paving Blok Masuk BTN Wesebbe		1 Km	
Pemasangan Paving Blok Jl. Semangka Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Pemasangan Paving Blok Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton dalam Kecamatan Watang Sidenreng		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Maccorawalle Kecamatan Panca Rijang		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue		1 Km	
Rabat Beton dalam Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca Lautang		1 Km	
Rabat Beton dalam Lingkungan Muhajirin Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang		1 Km	
Rabat Beton dalam Lingkungan Orai Salo Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca Lautang		1 Km	
Rabat Beton dekat Taman Makam Pahlawan Andi Takko Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue		1 Km	
Rabat Beton Depan SDN 16 Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton Jalan BTN Korpri Bojoe Kelurahan Arawa Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton Jalan Dongli Lr 1 Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue		1 Km	
Rabat Beton Jalan Ganggawa Lorong 3 Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton Jalan H. Umar Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae		1 Km	
Rabat Beton Jalan Keramat Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang		1 Km	

Rabat Beton Jalan Lapangan Merdeka Kecamatan Dua Pitue				1 Km
Rabat Beton Jalan Masjid Al munawarah Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu				1 Km
Rabat Beton Jalan Pasampoi Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton Jalan Pekuburan Abadi Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Jalan Pekuburan Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton Jalan Pelita Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat beton Jl. A. Balla Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton Jl. Andi Makkasau Lr IV Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Jl. Dikbud sebelah Kantor KUA Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton Jl. Masuk BTN Rijang Pittu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Jl. Merpati Kecamatan Watang Sidenreng				1 Km
Rabat Beton Jl. Pendidikan (belakang SDN 3 Watang Sidenreng) Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng				1 Km
Rabat Beton Jl. Utami Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Kelurahan Arawa Kecamatan Watang pulu				1 Km
Rabat Beton Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang				1 Km
Rabat Beton Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton Kelurahan Rijang Pittu Depan Rumah Pak Syukri Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Lingkungan 2 Majjelling Timoreng Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Latongkaluku Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton Sebelah Timur Puskesmas Baranti Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton Sebelah Utara Terminal Pangkajene Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Sekitar Lapangan Sepak Bola A. Sulolipu Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Bola Bulu Kecamatan Panca Rijang				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Mattirotsi Kecamatan Watang Pulu				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Passeno Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Takkalasi Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Tanete Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Tonrongge Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Tonrong Rijang Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton dalam Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riase				1 Km
Rabat Beton Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang				1 Km
Rabat Beton Dusun 1 Sudatu Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe				1 Km
Rabat Beton Dusun I Desa Kanie Kecamatan Maritenggae				1 Km
Rabat Beton Dusun II Pujo Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa				1 Km
Rabat Beton Jalan Abadi Desa Salobukkang Kecamatan Dua Pitue				1 Km
Rabat Beton Jalan Eliang Desa Passeno Kecamatan Baranti				1 Km
Rabat Beton Jalan Lagalumpang Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue				1 Km

Pembangunan Gedung Masyarakat	Kecamatan Watang	1 unit	M
Rehab Kantor Desa	Sidenreng Rappang Majene	Ls	M
Rehabilitasi Kantor Camat Dua PituE Bertingkat		1 Unit	M
Lanjutan Pembangunan Pagar Mesjid Besar Dua PituE		315 M	M
Pembangunan Pagar Kantor Lurah Salomallori	LK II Kel. Salomallori	1 Paket	M
Rehab Berat Kantor Camat Kulo	Kec. Kulo	1	M
Rehab Kantor Desa Abbokongeng	Desa Abbokongeng	1	M
Pembangunan Gedung Masyarakat Kulo	Desa Kulo		M
Pembangunan Rumah Jabatan Camat Watang Pulu	Kecamatan Watang Pulu	1 Unit	M
Rehab Gedung Masyarakat Watang Pulu di Kelurahan Uluale sampai Puskesmas	Kecamatan Watang Pulu	2 Unit	M
Rehabilitasi Kantor Kelurahan Rappang	Kelurahan Rappang	1 Paket	M
Rehab Berat Kantor Kelurahan Kadidi	Kelurahan Kadidi	1 Unit	M
Rehab Berat Kantor Kecamatan Panca Rijang (Toilet/WC)	Kecamatan Panca Rijang	1 Paket	M
Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Kadidi	Kecamatan Panca Rijang		M
Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Toddang Pulu	Kel. Toddang Pulu	60 m	M
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Arateng	Kel. Arateng	1 paket	M
Pemasangan Paving Blok Kantor Kelurahan Toddang Pulu	Kel. Toddang Pulu	500 m ²	M
Pembangunan Plafon Kantor Kelurahan Baula	Kelurahan Baula	1 paket	M
Rehab Atap dan Plafon Kantor Kelurahan Massepe	Kel. Massepe	1 unit	M
Kelanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Amparita	Lingk. I Kel. Amparita	1 paket	M
Pembangunan Paving Blok Gedung Masyarakat	Lingk. I Kel. Amparita	30 x 30 m	M
Rehab Berat Ruang Pertemuan	Kecamatan Pitu Riawa		M
Penambahan Ruang Kantor Kelurahan Lancirang	Lingk. I Lancirang	2 unit	M
Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Bilokka	Lingkungan Bilokka Kelurahan Bilokka	1 Unit	M
Rehab Berat Kantor Lurah Lajonga	Kelurahan Lajonga	1 Paket	M
Lanjutan Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Lajonga	Kelurahan Lajonga	40 m	M
Pembangunan Gerbang Pintu Keluar Kantor Kelurahan Pangkajene	Kantor Kelurahan Pangkajene	1 Unit	M
Pembangunan Asrama Siswa PONPES AL - IKHLAS Desa Bila Kecamatan Dua PituE (Lanjutan)		1 Unit	R
Pembangunan Gedung NU Center Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu		1 Unit	R

8	<p align="center">PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</p> <p>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penataan Kawasan Taman Religius Nona Nonae</p>		
9	<p align="center">PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</p> <p>Pembangunan / Pemasangan PJU Desa Lainungan Poros Sidrap - Parepare</p> <p>Pengadaan Lampu Peduli Lorong Kec. Baranti</p> <p>Pengadaan Lampu Peduli Lorong Kec. Wala Kec. Maritenggae</p> <p>Pengadaan Pemasangan Lampu Hias Nona Nonae</p> <p>Pengadaan / Pemasangan Lampu PJU dalam Kawasan Nona Nonae</p> <p>Pengadaan PJU Tersebar di Kec. Kulo, Kec. Panca Rijang dan Kec Baranti</p>	<p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p> <p>1 Paket</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>R</p> <p>R</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>R</p>
10	<p align="center">PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota</p> <p>Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Kelurahan Amparita</p> <p>Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Kelurahan Bangkai</p>	<p>30 Rumah</p> <p>30 Rumah</p>	<p>D</p> <p>D</p>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN).

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2023, terdapat Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang terkait langsung dengan fokus pembangunan tahun 2023 antara lain Industri 4.0 di lima Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi; (2) Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai; (3) Sembilan Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0; (5) Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu; (6) Penguatan Sistem Kesehatan Nasional; (7) Integrasi

Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh; (8) Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

III.1.2 . Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang- Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang- Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, PN5. Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2023 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusatpusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku

berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2023, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan

perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

III.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan selama 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018- 2023. Kedudukan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 (tiga) dari proses penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dalam rangka mencapai visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018- 2023 adalah sebagai berikut: "Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter". Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang "Bersih dan Melayani",

“Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Pelayanan dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

III.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan

kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023 yaitu: Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas SDM, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
4. Percepatan Pemulihan ekonomi dan reformasi perlindungan sosial
5. Pengelolaan Sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik.

III.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

III,2,1 Tujuan

Tujuan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas.

III,2.2 Sasaran

Sasaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah Meningkatnya infrastruktur kebinamargaan, Meningkatnya infrastruktur keciptakarya, Meningkatnya infrastruktur tata ruang dan Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan pelayanan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan Kegiatan

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera “

Program Prioritas Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 adalah

a. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.

Jumlah Program Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 adalah 15 Program yang terdiri dari 29 Kegiatan dan 111 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1). Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD

- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3). Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan barang Milik Daerah
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4). Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota
 - a. Pembangunan Jalan
 - b. Rehabilitasi Jalan
 - c. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - d. Pembangunan Jembatan

e. Rehabilitasi Jembatan

3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - a. Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan
 - b. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
- 2). Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - b. Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi
- 3). Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - a. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - b. Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
 - c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - d. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - e. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

- f. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- g. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- h. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- i. Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- j. Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- k. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
- l. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
- m. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - c. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 - d. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - e. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
 - f. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - g. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - h. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - i. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah

Domestik

- j. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- k. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- l. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- m. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
- n. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- o. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT
- p. Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- 1). Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 - b. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
 - c. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
 - d. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - e. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - f. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - g. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
 - h. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - i. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan

- j. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- k. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan
- l. Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
- m. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
- n. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

7. Program Pengembangan Permukiman.

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan Gedung

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
 - a. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan
 - b. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- 1). Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

- b. Penataan Bangunan dan Lingkungan
- c. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 1). Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - a. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang
- 2). Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 3). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - b. Sistem Informasi Penataan Ruang

11. Program Pengembangan Perumahan

- 1). Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - b. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - c. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

- d. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - e. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- 2). Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- a. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 3). Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
 - b. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 4). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

12. Program Kawasan Permukiman

- 1). Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- 2). Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - a. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - b. Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

13. Program Perumahan dan Permukiman Kumuh

- 1). Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota
 - a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - b. Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - c. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

(PSU)

- 1). Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - a. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

- b. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

15. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

- 1). Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM Regional
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kapasitas Peningkatan SPAM Regional
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional
	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui optimalisasi SPAM Regional

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun
	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi
	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dikerjakan
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun
	Rehabilitasi Jembatan	banyaknya jembatan yang direhabilitasi
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih
	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur / Asesor / penyelenggara pelatihan
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi

	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tercetaknya sertifikasi tenaga terampil
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi tersedia
	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersusunnya data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemanfaatan jasa konstruksi
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan jasa konstruksi
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Laporan Supervisi SPALDT

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALDT Terbangun
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPALDT berfungsi baik
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPALDT 50 KK Berfungsi Baik
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi
Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Terbina
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Lokasi Sosialisasi
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pelatihan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Terlayani Pengelolaan Air Limbah
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Laporan Supervisi SPALDS
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi

	Skala Permukiman	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana pengangkutan
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Terlayani Pengelolaan Air Limbah
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT Terpelihara
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Supervisi Sarana dan Prasarana IPLT
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi baik
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Master Plan
	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen DED
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Supervisi Sistem Drainase Perkotaan
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terbangun

	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terbangun
	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Terpelihara
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Terbangun
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Terpelihara
	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Supervisi Sistem Drainase Lingkungan
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terbangun
	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terbangun
	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase Terpelihara
	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Terbangun
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Master Plan
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan permukiman yang terbangun pada kawasan strategis daerah

	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Infrastruktur Kawasan Permukiman
	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen tersusun
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun
9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan yang tertata

	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan yang tertata
	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen supervisi tersusun
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan terbangun
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen yang tersusun
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Dokumen Tersusun

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen yang tersusun
11.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	Jumlah Dokumen yang tersusun

	Kabupaten/Kota	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan rumah layak huni
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya rumah korban bencana
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Susun yang dikelola
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Rumah susun yang dikelola
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah susun yang dikelola
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan	Penyelenggaraan Perumahan

	Rumah Sederhana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikendalikan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah rumah susun yang dikelola
12.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikendalikan
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen lokasi untuk perumahan dan permukiman kumuh

	Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen yang tersusun
13.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Menurunn ya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki
	Kerjasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama dengan instansi lain non Pemerintah
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat
14.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan

	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang dibangun
15.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan / diganti rugi

Tabel 5
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanian dan Perumahan Rakyat Tahun 2023
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanian dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp. 000)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Batu Lappa	100	7.055.301	APBD II	100	8.067.983
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat		100	70.000		100	70.000
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang		4	10.000		4	10.000
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1	10.000		1	10.000
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		1	10.000		1	10.000
1 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1	10.000		1	10.000
1 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD		1	10.000		1	10.000
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd		5	10.000		5	10.000
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	10.000		3	10.000
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah		100	5.356.843		100	5.435.000
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12	5.321.843		12	5.400.000
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12	20.000		12	20.000

1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	15.000	18	Laporan	15.000
1	03	01	2.04		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	Persen	-	100	Persen	50.000
1	03	01	2.04	01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Bulan	-	12	Bulan	40.000
1	03	01	2.04	03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	Bulan	-	12	Bulan	10.000
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	604.019	100	Persen	670.000
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	10.150	1	Paket	20.000
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	0	Paket	-	1	Paket	50.000
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	Paket	8.869	1	Paket	15.000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	Paket	70.000	1	Paket	70.000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	5	Dokumen	15.000	5	Dokumen	15.000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130	Laporan	500.000	130	Laporan	500.000
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	-	100	Persen	100.000
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	10	Unit	-	10	Unit	25.000
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	20	Unit	-	20	Unit	75.000
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	480.903	100	Persen	747.983
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	650	Laporan	7.983	650	Laporan	7.983
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12	Laporan	232.020	12	Laporan	240.000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	240.900	12	Laporan	500.000

1	03	01	2.09	01	03	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100	Persen	543.535	100	Persen	995.000
1	03	01	2.09	01	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	15	Unit	256.325	15	Unit	420.000
1	03	01	2.09	03	01	03	2.09	03	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	12	Unit	237.210	12	Unit	420.000
1	03	01	2.09	07	01	03	2.09	07	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	12	Unit	-	12	Unit	15.000
1	03	01	2.09	08	01	03	2.09	08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12	Unit	-	12	Unit	40.000
1	03	01	2.09	09	01	03	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya Yang Dipelihara / direhabilitasi	2	Unit	50.000	2	Unit	100.000
1	03	10							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	61	Persen	69.809.186	61	Persen	16.594.532
1	03	10	2.01						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	61	Persen	69.809.186	61	Persen	16.594.532
1	03	10	2.01	05					Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	30	Km	46.561.525	7	Km	14.000.000
1	03	10	2.01	09					Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi	20	Km	19.921.130	2	Km	1.000.000
1	03	10	2.01	11					Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	20	Km	2.893.632	5	Km	594.532
1	03	10	2.01	12					Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	10	M	432.900	2	M	500.000
1	03	10	2.01	13					Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	0	0	-	12	M	500.000
1	03	11							PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat	100	Persen	100.000	100	Persen	545.000
1	03	11	2.01						Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga terampil yang terlatih	100	Persen	100.000	100	Persen	400.000
1	03	11	2.01	01					Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur / Asesor / pelaksana pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analis yang disiapkan	7	Orang	-	7	Orang	100.000
1	03	11	2.01	04					Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknis atau analis yang mengikuti pelatihan	50	Orang	100.000	50	Orang	250.000

1	03	11	2.01	05	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	-	-	-	50	Orang	50.000
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara	0	Persentase	100	Persentase	95.000	
1	03	11	2.02	01	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi	0	Dokumen	2	Dokumen	50.000	
1	03	11	2.02	02	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi	-	-	1	Dok	45.000	
1	03	11	2.03		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pemanfaatan jasa konstruksi	-	-	100	Persentase	50.000	
1	03	11	2.03	01	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	-	-	1	Laporan	50.000	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100	Persentase	100	Persentase	16.243.906	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	100	Persentase	100	Persentase	16.243.906	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun	1	Dok	1	Dok	609.440	
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perbaikan SPAM	Jumlah konsultasi supervisi pembangunan / peningkatan / perluasan / optimalisasi SPAM	0	Dok	0	Dok	190.642	
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang terbangun	57	Liter/ debik	57	Liter/ debik	500.000	
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya / SPAM berbasis masyarakat	57	SR	57	SR	571.983	
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	60	Liter/ debik	60	Liter/ debik	861.120	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Yang Berakses Air Minum	400	SR	400	SR	8.371.861	

1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu	120	SR	1.216.016			120	SR	1.456.000
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Berkases Air Minum	50	SR	1.200.000			20	SR	442.000
1	03	03	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	-		-			100	Unit	500.000
1	03	03	2.01	21	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM bukan jaringan perpipaan yang dioptimalisasi	-		-			100	Unit	1.000.000
1	03	03	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	-		-			100	KSM	500.000
1	03	03	2.01	23	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK / Perkotaan atau SPAM tematik tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-		-			100	Unit	740.860
1	03	03	2.01	24	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM berbasis masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	-		-			100	Unit	500.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1	03	05			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	Persen	7.447.532			100	Persen	12.547.212
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bersantiasi	100	Persen	7.447.532			100	Persen	12.547.212
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD dalam daerah Kabupaten / Kota yang disusun	0	Dok	-			1	Dok	300.000
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah dokumen supervisi kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	0		-			1	Dok	111.585
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	0		-			1	rumah tangga	100.000

1	03	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD - T skala kota	0						1	Rumah tangga	100.000
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD - T skala permukiman		Rumah tangga					1	Rumah tangga	100.000
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	1000	Rumah tangga	7.447.532				1000	Rumah tangga	10.910.489
1	03	05	2.01	07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	0						10	Orang	100.000
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sistem air limbah domestik		Kelompok					11	Kelompok	100.000
1	03	05	2.01	09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	0	Orang					10	Orang	22.923
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara							100	Unit	100.000
1	03	05	2.01	11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah konsultasi supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman							1	Dok	100.000
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman							10	Rumah tangga	100.000
1	03	05	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah penyediaan armadapengangkutan lumpur tinja							1	Unit	102.215
1	03	05	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga yang terlayani penyedotan lumpur tinja							600	rumah tangga	100.000
1	03	05	2.01	14	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang dioptimalisasi							1	m3/hari	100.000

1	04	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen kesepakatan dengan pengembang / pelaku pembangunan rumah untuk penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	5	Dok	50.000
1	04	02	2.04	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah pegawai BLU / BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	-	-	-	-	1	Orang	50.000
1	04	02	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-	-	-	-	4	Laporan	50.000
1	04	02	2.04	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-	-	-	-	1	Laporan	50.000
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		100	Persen	200.000		100	Persen	954.250
1	04	03	2.02		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	100	Persen	250.000
1	04	03	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	-	-	-	-	1	Laporan	250.000
1	04	03	2.03		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh	0	Persen	200.000		100	Persen	704.250
1	04	03	2.03	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	0	Dok	-		1	Dok	151.500
1	04	03	2.03	02	Penyusunan Rencana dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	2	Dok	200.000		1	Dok	552.750
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100,00	Persen	600.000		100,00	Persen	2.399.810
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	Menurunnya luas permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha	100,00	Persen	600.000		100,00	Persen	2.399.810

1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan berkembangnya kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki.	12	Unit Rumah	600.000		30	Unit Rumah	2.199.810
1	04	04	2.01	02	Kejasama Perbaikan Rumah Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-	-	-	3	Dok	100.000
1	04	04	2.01	03	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen data penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)	-	-	-	-	2	Dok	100.000
1	04	05	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (Psu)	Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan	80,19	Persen	7.640.000		80,19	Persen	9.774.500
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase PSU perumahan	80,19	Persen	7.640.000		80,19	Persen	9.774.500
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	0	Dok	-		1	Dok	100.000
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11	Kec	7.640.000		11	Kec	9.674.500
2	10	05	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100	Persen	249.200		100	Persen	2.790.130
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan	100	Persen	249.200		100	Persen	2.790.130
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Dok	249.200		1	Dok	2.790.130
									107.002.223				125.570.959

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam RAPBD 2023 dan RKA/DPA 2023. Penjabaran dimaksud akan dikoordinasikan dengan TAPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Renja Dinas Bina Marga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat ini menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Dinas Bina Marga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat menjadi penanggung jawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Renja ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat pengguna infrastruktur bidang pekerjaan umum.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2022

Kepala Dinas



Drs. ABDUL RASYID, M.Si

IP. 19661230198611 1 001